

Optimalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Desa Digital Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo

Serly Dian Anugrah, Anggie Novita Rahmadani, Olifvia Dwiyanti, Arimurti Kriswibowo

*Prodi Administrasi Publik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*

Email: serlydianugrah@gmail.com

Abstrak - Desa Banjarsari merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan website desa sebagai bentuk dari penerapan digitalisasi. Digitalisasi dilakukan karena penerapan website desa di Desa Banjarsari masih belum berjalan dengan maksimal. Upaya ini diharapkan terus mengalami perkembangan untuk mendorong perwujudan desa digital di Desa Banjarsari. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Banjarsari dalam mengatasi data yang tidak terkelola dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil observasi menunjukkan adanya revitalisasi pelayanan publik di Desa Banjarsari dengan kembali menerapkan website desa dalam pelayanannya. Keberhasilan penerapan website desa di Desa Banjarsari ditinjau melalui 10 faktor yaitu informasi, teknologi, proses, nilai dan tujuan, sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu, kelembagaan dan struktur, peraturan, kepemimpinan dan komitmen, serta dukungan dari masyarakat. Faktor ini menjadi pendukung upaya memaksimalkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, serta mendorong Desa Banjarsari menuju desa digital. Dari kesepuluh faktor tersebut proses, peraturan, nilai dan tujuan, serta kepemimpinan dan komitmen menjadi faktor penguat implementasi website desa sebagai pendukung pelayanan publik berbasis digitalisasi. Enam faktor lainnya masih diperlukan pengembangan dalam pelaksanaannya. Ini menjadi saran rekomendatif untuk pemerintah desa dan tema untuk kegiatan pengabdian selanjutnya.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pengelolaan Data, Desa Digital, Desa Banjarsari

Abstract - Banjarsari Village is one of the villages that has implemented a village website as a form of digitalization. Digitalization was carried out because the implementation of the village website in Banjarsari Village was still not running optimally. It is hoped that this effort will continue to develop to encourage the realization of a digital village in Banjarsari Village. The aim of this activity is to describe the efforts made by the Banjarsari Village government to overcome data that is not well managed in order to improve the quality of effective and efficient public services. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. The observation results show that there is a revitalization of public services in Banjarsari Village by re-implementing the village website in its services. The success of implementing a village website in Banjarsari Village is reviewed through 10 factors, namely information, technology, processes, values and goals, human resources, financial resources and time, institutions and structures, regulations, leadership and commitment, and support from the community. This factor supports efforts to maximize the quality of effective and efficient public services, as well as pushing Banjarsari Village towards a digital village. Of these ten factors, processes, regulations, values and goals, as well as leadership and commitment are factors that strengthen the implementation of village websites as supporters of digitalization-based public services. Six other factors still require development in implementation. This is a recommendation for the village government and a theme for further service activities.

Keywords: Digitalization, Data Management, Digital Village, Banjarsari Village

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi berkembang dengan sangat pesat sejalan dengan arus globalisasi dunia. Globalisasi mendorong adanya revitalisasi di berbagai negara, terutama Indonesia. Revitalisasi berfokus pada penataan kelembagaan pemerintah yang berpusat pada *good governance* sebagai pondasi utamanya. *Good governance* sendiri memiliki 3 pilar utama yaitu *government*, *sector* dan *civil society* yang pada penerapannya menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

supremasi hukum dan juga keadilan sosial [1]. Dorongan globalisasi dan juga *good governance* tersebut serta meluasnya teknologi informasi di berbagai negara memberikan dampak bagi pola dan tata hidup masyarakat, tidak terkecuali dampak bagi sistem pemerintahannya. Banyak dari strategi kebijakan organisasi yang sudah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Pada sektor publik berkembang strategi *e-government*. *E-government* ialah cara pemerintah dapat memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik [2].

Dampak yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi ini juga merambah ke berbagai bidang dan lapisan masyarakat, tidak terkecuali pemerintah desa [3]. Untuk membentuk suatu pemerintahan desa berbasis *e-government* dengan tujuan memberikan pelayanan yang efektif dan efisien pada masyarakat, pengembangan *website* desa mulai digagas oleh pemerintah desa di Indonesia. Pengembangan *website* desa juga sejalan dengan Undang-undang Desa pasal 82 No. 6 tahun 2014 dalam ayat 2 bahwasanya pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa [4]. *Website* desa sendiri merupakan sebuah media elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai sarana pengembangan desa dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik [5]. *Website* desa juga dapat digunakan sebagai media promosi potensi desa, media informasi umum, dan pelayanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi informasi [6].

Desa Banjarsari merupakan salah satu desa di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. Desa Banjarsari memiliki lima dusun yaitu Beji, Brak, Blobo, Banjar Selatan dan Banjar Utara. Memiliki letak strategis di pesisir pantai utara dan dilalui jalur Pantura menjadikan Desa Banjarsari memiliki potensi desa yang beragam. Desa Banjarsari juga memiliki banyak UMKM desa yang berkembang dengan baik. Dengan itu, pemerintah desa perlu memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi desa yang ada. Desa Banjarsari tidak memiliki pengelolaan *website* desa yang baik. Pemerintah Desa Banjarsari kurang memiliki kesadaran yang cukup untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan dan pembangunan desa melalui *website* desa. Akibat dari tidak dikelolanya *website* desa dengan baik juga berpengaruh pada pemberian pelayanan publik di Desa Banjarsari.

Dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini, pelayanan publik dengan menggunakan media *website* desa sudah dimanfaatkan oleh banyak pemerintah desa di Indonesia [7]. Desa Banjarsari mulai melakukan revitalisasi pelayanan melalui penggunaan *website* desa sebagai media pelayanan publik yang efektif dan efisien. Desa Banjarsari juga berkolaborasi dengan pihak eksternal, salah satunya dengan mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur dalam pengembangan *website* desanya. Dengan adanya kolaborasi tersebut, Desa Banjarsari kembali memiliki *website* desa yang terintegrasi dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan mendukung terciptanya desa digital. *Website* desa ini tidak hanya meliputi pelayanan administrasi akan tetapi juga

menyuguhkan potensi desa terutama di bidang *private sector*. Mengacu pada fenomena tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk membuat kajian lebih dalam berkaitan dengan optimalisasi pelayanan publik melalui penerapan *website* desa dalam mewujudkan desa digital di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. Tujuan kajian adalah untuk meninjau optimalitas perubahan di Desa Banjarsari di bidang pelayanan setelah menggunakan wajah baru *website* desa sebagai pelayanan publik.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan serta menjelaskan secara tepat mengenai permasalahan yang terjadi. Data yang diperoleh terbagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari aktivitas terjun langsung ke lokasi melalui program kerja pengabdian masyarakat di Desa Banjarsari. Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, berita, penelitian terdahulu, dan studi dokumen [8]. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, identifikasi (wawancara), penentuan tujuan, dan pelaksanaan. Metode analisis data interaktif mendalam yang digunakan yaitu metode Miles dan Huberman [9] meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kegiatan kajian berfokus pada proses digitalisasi yang ada di Desa Banjarsari melalui implementasi *website* desa. Menurut Chairina [10] agar implementasi *website* desa berhasil maka perlu fokus menerapkan 10 faktor keberhasilan yaitu (1) Informasi, (2) Teknologi, (3) Proses, (4) Tujuan dan Nilai, (5) Sumber Daya Manusia, (6) Sumber Daya Keuangan dan Waktu, (7) Kelembagaan dan Struktur, (8) Peraturan, (9) Kepemimpinan dan Komitmen, (10) Dukungan Masyarakat. Faktor-faktor ini juga yang menjadi fokus kajian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Banjarsari

Banjarsari merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Desa Banjarsari memiliki 5 dusun dalam pembagian wilayahnya, yaitu dusun Brak, Dusun Beji, Dusun Blobo, Dusun Banjar Selatan, dan Dusun Banjar Utara. Jumlah penduduk Desa Banjarsari berdasarkan data kependudukan tahun 2022 yaitu sebanyak 8.214 orang, yang terdiri dari 4.086 laki-laki dan 4.128 perempuan. Desa ini terletak ± 4 Km dari Kecamatan Sumberasih, secara geografis batas-batas wilayah Desa Banjarsari di sebelah :

- Utara : Selat Madura
- Timur : Desa Lemah Kembar

- Selatan : Desa Ambulu dan Sumendi
- Barat : Desa Bayeman

Berdasarkan letak wilayahnya, Desa Banjarsari berada di posisi strategis, ramai, dan padat penduduk. Karena Desa Banjarsari berada di jalur Pantura, banyak potensi desa yang dimiliki, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga UMKM, yang dapat semakin berkembang dan memajukan desa apabila pemerintah desa memberikan fasilitas pendukung. Oleh karena itu, pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi poin utama dalam membantu memajukan Desa Banjarsari dalam *digital governance*.

Bentuk usaha yang dilakukan untuk mengelola sistem informasi desa menjadi lebih baik lagi dengan diadakannya kegiatan *Workshop Pengelolaan Website Desa dan Pendampingan Mitra* yang bekerja sama dengan UPN Veteran Jawa Timur dengan mengangkat tema *Digital Governance*. Kegiatan diadakan di Bale Hinggil dan dihadiri kepala desa, sekretaris desa, dan staf bagian IT. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan serta wawasan pemerintah desa mengenai pengelolaan *website* desa yang dijadikan sebagai fasilitas pendukung kehadiran dan publikasi pemerintah desa, yang diharapkan tersedia dan dapat diakses masyarakat [11]. Selain itu, terdapat kegiatan lainnya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dan juga fasilitas desa yaitu sosialisasi, pelatihan serta pendampingan pengelolaan *website* desa di Balai Desa Banjarsari (Gambar 1).



Gambar 1. Balai Desa Banjarsari, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo

Adanya *launching website* desa hasil dari kolaborasi pemerintah Desa Banjarsari dan pihak eksternal mendapatkan respon yang positif, baik dari perangkat desa, dan masyarakat setempat. *Website* Desa Banjarsari yang mulai dikembangkan dan beroperasi pada bulan Oktober 2023 ini menyediakan berbagai fitur yang memberikan informasi mengenai Desa Banjarsari (Tabel 1). Di dalamnya terdapat (a) profil desa, berisi sejarah, visi

dan misi, demografi, serta geografis, (b) pemerintahan, mencakup struktur, perangkat desa, dan lembaga desa, (c) informasi publik, mencakup galeri, pengumuman, dan berita, dan (d) pelayanan, mencakup informasi mengenai persyaratan pelayanan dan pelayanan digital (Gambar 2). Alamat *website* Desa Banjarsari yaitu <https://banjarsari.probolinggo.com>. Halaman utama *website* desa menampilkan potensi yang berada di Desa Banjarsari, video profil, album, data persentase luas wilayah desa, jumlah penduduk, dan juga APBD Desa Banjarsari, serta berita terkait kegiatan yang dilakukan di Desa Banjarsari.

Tabel 2. Uraian Fitur-fitur pada Website Desa Banjarsari

No.	Fitur Layanan	Keterangan
1.	Menu Portal/Beranda Web	Berisi informasi-informasi mengenai Potensi UMKM yang ada di Desa Banjarsari.
2.	Menu Profil Desa	Berisi informasi-informasi mengenai Sejarah Desa, Visi & Misi, Demografi Desa, dan Geografis Desa.
3.	Menu Pemerintahan	Berisi informasi-informasi mengenai Struktur Pemerintahan Desa, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa.
4.	Menu Informasi Publik	Berisi informasi-informasi mengenai Galeri/Album Desa, Pengumuman, Berita.
5.	Menu Pelayanan	Berisi informasi-informasi mengenai Persyaratan Pelayanan (surat pindah, surat datang, akta kelahiran, akta kematian) dan Pelayanan Digital.



Gambar 2. Tampilan Depan Website Desa Banjarsari

Kajian 10 Faktor Pendukung Implementasi e-Government

Implementasi *website* Desa Banjarsari dapat dianalisis dengan sepuluh faktor yang berjudul “sukses implementasi *e-government*” [10] yaitu:

- Informasi**, adalah media yang penting karena dapat digunakan untuk menghubungkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sendiri. *Website* Desa Banjarsari difasilitasi dengan sejumlah informasi tentang UMKM yang ada di Desa Banjarsari, serta produk-

produknya. Hal itu yang telah menjadi media penghubung dengan masyarakat sebagai upaya promosi produk UMKM desa dan akuntabilitas publik. Dengan adanya informasi yang tepat mengenai profil desa yang di dalamnya terdapat berbagai fitur informatif, diharapkan masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada perangkat Desa Banjarsari dan dapat menjadikan *website* Desa Banjarsari ini sebagai sarana utama untuk mendapatkan berbagai informasi yang ada di Desa Banjarsari.

- b. **Teknologi.** Pembangunan infrastruktur dan aplikasi tentang implementasi *e-government* telah diberi pelatihan dan pendampingan dari segi teknis yang berkolaborasi dengan pihak swasta. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan bidang TIK dapat memberikan keefektifan dalam implementasi *e-government* berupa *website* desa.
- c. **Proses** perancangan *website* Desa Banjarsari ini tidak membutuhkan waktu lama. Hal itu dapat terjadi karena adanya tekad yang kokoh dari para pihak, termasuk pihak eksternal Mahasiswa sebagai pihak eksternal berperan sebagai media perantara yakni untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada perangkat Desa Banjarsari dalam mengoperasikan *website* Desa Banjarsari.
- d. **Nilai dan tujuan** dari pembuatan *website* Desa Banjarsari ini dimulai dengan adanya akuntabilitas publik dan transparansi informasi sekaligus promosi UMKM yang ada di desa. Oleh karena itu, nilai yang kembangkan pada implementasi *website* Desa Banjarsari ini mengarah pada hal tersebut. Berbagai menu dalam *website* memperlihatkan maksud paling utama dari adanya transparansi anggaran dan akuntabilitas pada publik. Selain itu, adanya profil UMKM dalam *website* Desa Banjarsari merupakan strategi pemerintah desa dalam mempromosikan produk lokal desa.
- e. **Sumber daya manusia** yang dimiliki diperoleh dari staf dan warga Banjarsari yang ditunjuk sesuai dengan kemampuannya dalam menggunakan sistem informasi desa. Hanya ada sedikit orang yakni staf bagian operator *website* desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Sumber daya manusia pemerintah Desa Banjarsari bukan dari orang yang berpengalaman di bidang IT. Hal itu dapat berpengaruh besar terhadap pengimplementasian *website* desa mengingat masih banyak ditemukan kolom menu yang datanya masih belum terisi.
- f. **Sumber daya keuangan dan waktu** adalah hal penting yang wajib dipahami. Semakin banyak dana yang telah dibelanjakan untuk pengelolaan *website* desa maka akan semakin

tinggi juga tingkat modernisasi teknologi pada *website* yang akan diterima. Pemerintah Desa Banjarsari telah merasakan urgensi dari penyediaan faktor keuangan dalam proses pengimplementasian *website* desa yang dapat dilihat dari perkembangan menu yang menjadi lebih lengkap dan menarik.

- g. **Kelembagaan atau struktur** dibutuhkan agar tanggung jawab dan tugas lebih praktis dan jelas. Desa Banjarsari memiliki struktur organisasi, dibantu mahasiswa untuk mengisikannya pada menu *website* desa.
- h. **Peraturan** pengimplementasian *website* Desa Banjarsari digunakan sebagai landasan hukum dan untuk mengembangkan komitmen. Peraturan yang diadopsi dan dijadikan acuan dalam pengimplementasian *website* Desa Banjarsari yakni Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 32 Tahun 2020 tentang *Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Laporan Anggaran Desa dengan Sistematis*.
- i. **Kepemimpinan atau komitmen** yang kokoh dari pemimpin organisasi adalah salah satu faktor yang sangat mendorong keberhasilan pengimplementasian *website* desa ini. Faktor kepemimpinan ini dapat dilihat dari cara dan kemampuan dalam mengarahkan para anggotanya untuk menunjang keberhasilan pengimplementasian *website* desa. Kepemimpinan dalam pengimplementasian *website* Desa Banjarsari dikepalai langsung oleh seorang kepala desa atau biasa disebut dengan Pak Tinggi. Dukungan yang dilimpahkan dari pihak pemerintah Desa Banjarsari berupa finansial dan pemberian motivasi. Dukungan dari segi finansial ini dapat dilihat dari keikutsertaan perangkat desa dalam memberikan anggaran pada saat awal *launching website* Desa Banjarsari. Segi motivasi dapat dilihat dari keterlibatan para perangkat Desa Banjarsari selama pengimplementasian *website*.
- j. **Dukungan Masyarakat** ialah aset yang besar dalam pengimplementasian *website* desa. Dukungan dicoba diraih dengan mengadakan sosialisasi berupa pengenalan *website* desa kepada masyarakat tentang manfaatnya jika berjalan dengan maksimal. Pemerintah Desa Banjarsari hanya merasakan dukungan masyarakat dalam pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan.

Pembahasan

Jika dibandingkan dengan penelitian Sucipto et al [12] dalam pengimplementasian *website* di Desa Bandarsari, pemanfaatan teknologi informasi di kedua desa ini memiliki manfaat yang besar dalam hal komunikasi karena dengan adanya teknologi

informasi ini, pemerintah desa dan masyarakat dapat saling melakukan interaksi sekaligus bertukar informasi, memberikan pelayanan, dan melakukan pengelolaan data. Pemanfaatan TIK Desa Banjarsari adalah dengan memberikan sejumlah materi tentang tata cara pengoperasian *website*. Pada penelitian Praditya [13] pemanfaatan TIK di Desa Panjalu adalah dengan melakukan pengembangan sumber daya manusianya terlebih dahulu melalui pelatihan TIK untuk para kader maupun perangkat desa.

Pembentukan *website* di Desa Banjarsari ini tidak membutuhkan waktu dan proses yang lama karena adanya tekad yang kuat dan keterlibatan banyak pihak. Penelitian Damayanti et al [13] di Desa Kunjir menunjukkan proses pengimplementasian *website* desa yang sedikit memakan waktu yakni dalam rentang bulan Oktober 2021 sampai Januari 2022. Hal ini dikarenakan proses implementasi di Desa Kunjir melalui 5 proses, yaitu *Requirements Analysis* (analisa kebutuhan), *Design*, *Development*, *Testing* (pengujian *website*), dan *Maintenance* (pemeliharaan *website*). *Website* Desa Banjarsari hanya memerlukan pengembangan karena telah dibuat sebelumnya tapi tidak terawat baik.

Nilai dan tujuan awal dari adanya pembuatan *website* Desa Banjarsari ialah akuntabilitas dan transparansi publik serta sekaligus sebagai media promosi UMKM lokal yang ada di Desa Banjarsari. Menurut Nabillah et al [14] penerapan *website* desa di Desa Pulosari bertujuan untuk melakukan promosi potensi wisata. Pada aspek kondisi sumber daya manusia pemerintah Desa Banjarsari bukan dari orang yang berpengalaman di bidang IT, sedangkan penelitian Christopher et al [15] kondisi sumber daya manusia di Desa Manunggal Jaya mencakup aparatur pemerintah dan perangkat desa telah meningkat dalam pemahaman mengenai pengoperasian *website* desa, pengelolaan data, dan pemanfaatan alat-alat digital yang relevan.

Anggaran yang dikeluarkan oleh Desa Banjarsari bermanfaat untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas penunjang pengimplementasian *website* desa, sementara penelitian Sujono [16] menunjukkan bahwa Desa Puput memiliki prinsip yang sama dengan Desa Banjarsari yaitu mengeluarkan anggaran desa untuk memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas seperti pembelian komputer, pemasangan server yang bagus, dan lainnya. Hal itu dianggap dapat meningkatkan keefektifan dari penerapan *website* desa ini.

Struktur kelembagaan yang ada di Desa Banjarsari masih belum tersusun secara sistematis di dalam *website* desa. Hal itu dikarenakan para perangkat desa belum sepenuhnya bisa mengakses dan memasukkan struktural pemerintahan desa di *website*. Struktur kelembagaan itu penting untuk diketahui oleh umum karena hal tersebut berkaitan

dengan pertanggungjawaban tugas dan wewenang di pemerintahan desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Nabilah et al [14] dimana Desa Pulosari juga belum memiliki struktur organisasi, namun staf yang mengoperasikan *website* desa telah diangkat melalui SK dari Kepala Desa Pulosari yang nantinya akan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Desa Pulosari.

Faktor peraturan yang dijadikan acuan dalam pengimplementasian *website* Desa Banjarsari ini yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penatausahaan dan juga mencakup tentang Pengelolaan Data. Pada penelitian Nabilah et al [14], pengimplementasian *website* Desa Pulosari mengacu pada landasan hukum berupa Undang-Undang Desa 2014, SK Kepala Desa, dan Surat Perintah Bupati Jombang yang ditujukan kepada seluruh camat di Kabupaten Jombang. Kedua desa ini sama-sama mengadopsi peraturan yang berbadan hukum guna memperkuat penerapan *website* desa dan sebagai dasar untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan *e-government* ini. Dalam hal pemanfaatan digitalisasi, pemerintah memang perlu membuat regulasi agar penerapan pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa berjalan dengan maksimal dan optimal. Dengan itu akan mendorong pemerintah desa untuk sigap dalam beralih dari pelayanan konvensional menuju digitalisasi.

Pengimplementasian *website* desa didukung dengan peran pemimpin desa. Kepemimpinan yang ada di Desa Banjarsari dilakukan oleh seorang kepala desa yang memberikan komitmen berupa dukungan secara finansial maupun pemberian motivasi dalam berbagai hal. Kepala Desa Banjarsari akan selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa ini. Penelitian Hutagalung et al [17] Desa Bernung juga dipimpin oleh seorang kepala desa yang memiliki komitmen untuk selalu memberikan dukungan serta inovasi terhadap penerapan *website* desa. Hal tersebut dapat dilihat saat Kepala Desa Bernung berinisiatif untuk memberikan anggaran guna pelatihan *Website* Desa Bernung sebagai media inovasi desa.

Masyarakat Desa Banjarsari antusias mendukung karena dengan adanya penerapan *website* desa diharapkan Desa Banjarsari bisa menjadi desa digital. Dukungan dari masyarakat Desa Banjarsari ini dapat membantu proses penerapan *website* desa dengan efektif dan efisien karena pada penerapannya memang membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian Pertiwi et al [18] menunjukkan dukungan masyarakat di Desa Bulu Timoreng dapat dilihat dari tingkat banyaknya pengunjung *website* yang setiap harinya terus bertambah.

Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Website Desa Banjarsari

Beberapa faktor penghambat kurang maksimalnya penerapan *e-government* di Desa Banjarsari adalah banyak perangkat desa yang tidak mahir menggunakan media elektronik seperti komputer, internet, dan lainnya. Kurangnya keterampilan teknologi tersebut dapat didasari oleh beberapa alasan seperti tingkat pendidikan dan kurangnya pelatihan. Selain itu, masyarakat Desa Banjarsari juga memiliki kesadaran yang rendah akan teknologi informasi. Masyarakat awam dengan klasifikasi pendidikan menengah ke bawah dan lanjut usia tentu saja memiliki kesulitan dalam penggunaan teknologi. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan dari pemerintah desa untuk menangani permasalahan ini agar penerapan digitalisasi pemerintahan dapat terselenggara dengan baik dan menjadikan Desa Banjarsari menjadi desa digital yang melek akan teknologi terutama di bidang pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Adanya pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 di Desa Banjarsari dapat mewujudkan desa digital dalam bidang *digital governance*. Kegiatan Workshop Pengelolaan *Website* dan juga Pendampingan Mitra Bina Desa Berbasis *Digital Governance* menjadi salah satu usaha untuk mengelola sistem informasi desa menjadi lebih baik. Hadirnya *website* desa di Desa Banjarsari ini bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat sekaligus tempat promosi potensi yang dimiliki desa. Akan tetapi, kurangnya kesadaran masyarakat akan teknologi informasi mengakibatkan kurang menonjolnya potensi yang dimiliki desa. Penggunaan TIK dalam *website* desa dapat mengefektifkan implementasi *e-government* di Desa Banjarsari. Dalam pembentukan dan launching *website* perangkat desa berkontribusi penuh sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan cepat. Implementasi *website* desa ini akan semakin canggih apabila dana yang dikeluarkan lebih besar. Masyarakat Desa Banjarsari mengharapkan dengan adanya *website* desa ini sebagai sarana utama untuk mendapatkan berbagai informasi yang ada di Desa Banjarsari.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan pemerintah desa dapat melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai potensi yang ada pada Desa Banjarsari. Hal tersebut akan berpengaruh pada masyarakat Banjarsari dalam mengelola potensi yang telah dimiliki, sehingga masyarakat Desa Banjarsari semakin siap untuk menjadi desa digital. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi pemerintah desa mengenai teknologi

website desa secara berlanjut guna menyempurnakan segala informasi yang ada pada Desa Banjarsari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Program Studi Administrasi Publik UPN“Veteran” Jawa Timur, dosen pembimbing Bapak Arimurti Kriswibowo, S.IP, M.Si, Pemerintah dan masyarakat Desa Banjarsari, Kelompok MBKM Bina Desa Banjarsari UPN “Veteran” Jawa Timur, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumardi, A. Nawir, and S. Mukhlis, “Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia,” *Journal of Government Insight*, vol. 1, no. 2, pp. 84–91, 2021, doi: 10.47030/jgi.v1i2.308.
- [2] I. G. Prihanto, “Analisis Implementasi E-Government Pada Pemerintah [Analysis of the Implementation of E-Government on Regional Government Level in Indonesia],” *Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan*, pp. 1–16, 2012.
- [3] I. P. Artaya *et al.*, “Pelatihan Pengoperasian Website Desa Barengkrajan Sidoarjo Sebagai Media Penyebaran Informasi dan Komunikasi Masyarakat,” vol. 4, no. 4, pp. 1399–1407, 2023.
- [4] A. Widiyarta, “Dinamika governance,” *Ilmu Administrasi Negara*, vol. 7, no. April, pp. 64–81, 2017.
- [5] G. A. D. I. Mahayoni and I. D. A. P. Wirantari, “Pengembangan Website Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Desa Bona, Gianyar,” *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, vol. 1, no. 1, pp. 13–19, 2021, doi: 10.22225/jcpa.1.1.3311.13-19.
- [6] I. Nawangsih and S. B. Rahardjo, “Implementasi E-Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Teluk Buyung,” *Bulletin of Information Technology (BIT)*, vol. 3, no. 4, pp. 380–384, 2022.
- [7] J. Bungai, I. Perdana, and M. Affandi, “Implementasi literasi digital melalui pengembangan website desa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat,” *Jurnal AKRAB!*, vol. XI, no. 1, pp. 54–63, 2020.
- [8] Z. Arrizal and S. Sofyantoro, “Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan UMKM di Masa Pandemi Melalui Digitalisasi,” *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan dan Inovasi Daerah*, vol. 2, no. 1, pp. 39–48, 2020.

- [9] C. Sasmito and E. R. Nawangsari, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, vol. 3, no. 2, p. 68, 2019, doi: 10.26740/jpsi.v3n2.p68-74.
- [10] Chairina, "Faktor-faktor kesuksesan implementasi e-government di provinsi Jawa barat menggunakan analisis hermeneutik," Universitas Indonesia, 2014.
- [11] kalvin E. Wahyudi and M. Muljanto, "UPN Veteran Surabaya Gelar Workshop Pengelolaan Website Desa Dalam Rangka Pendampingan Mitra Bina Desa," patrolipos.
- [12] A. Sucipto *et al.*, "Penerapan Sistem Informasi Profil Berbasis Web Di Desa Bandarsari," *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1512.
- [13] D. Praditya, "Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa," *Jurnal Penelitian Komunikasi*, vol. 17, no. 2, pp. 129–140, 2014, doi: 10.20422/jpk.v17i2.12.
- [14] D. Damayanti *et al.*, "Penerapan Website Desa Kunjir Kecamatan Raja Basa," *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, vol. 3, no. 1, p. 49, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i1.1808.
- [15] A. Nabilah and E. H. Fanida, "Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang," *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. Vol.53, no. No.9, p. pp 1-6, 2017.
- [16] D. Christover, A. S. Hidayatullah, and I. Mawarni, "Penerapan Konsep-konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Sebrang Kabupaten Kutai Kartanegara," *Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic)*, vol. 2, no. 2, pp. 199–214, 2023.
- [17] S. Sujono, "Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Web Pada Kantor Kepala Desa Puput Kec. Simpangkatis," *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer*, vol. 9, no. 1, pp. 707–716, 2018, doi: 10.24176/simet.v9i1.2078.
- [18] S. S. Hutagalung, D. Hermawan, and N. Mulyana, "Pendayagunaan Website Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung," *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 299–308, 2021, doi: 10.18196/ppm.24.487.
- [19] A. Pertiwi, H. Dema, A. Mustanir, and E. Anugrah, "Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng)," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, vol. 9, no. 3, pp. 130–139, 2021, doi: 10.55678/prj.v9i3.508.

